

# PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERWUJUDAN *GOOD GOVERNANCE* DI DESA DAMAI KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

<sup>1</sup>Zhilviana Sulaeman, <sup>2</sup>Ahmad Mustanir, <sup>3</sup>Andi Ilham Muchtar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

[zhylviana28@gmail.com](mailto:zhylviana28@gmail.com)

[ahmadmustanir74@gmail.com](mailto:ahmadmustanir74@gmail.com)

## Abstrak

Partisipasi masyarakat terhadap perwujudan *good governance* di desa damai kecamatan watang sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun Populasi dalam penelitian ini berjumlah 476 kepala keluarga dengan tehnik pengambilan sampel menggunakan Rumus Slovin. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Kuesioner (Angket), dokumentasi dan wawancara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah nalisis regresi sederhana dengan menggunakan table frekuensi. Yang diolah menggunakan skala Likert dengan analisis SPSS V21. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang paling berpengaruh dalam partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam pelaksanaan sebesar 69,6% dan hasil terendah adalah indikator partisipasi dalam pembuatan keputusan sebesar 62,8%. Adapun indikator yang paling berpengaruh dalam *good governance* yaitu supremasi hukum sebesar 68,8% dan hasil terendah adalah keterbukaan sebesar 48,8%, hasil tersebut dilihat berdasarkan olahan data kuisioner dan SPSS V21.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Good governance.

## Abstract

*Participation in the realization of good governance in Damai village of Watang Sidenreng district, Sidenreng Rappang regency. The population in this study amounted to 476 heads of families through the Slovin formula as a technique sampling. The technique of data collection used were observation, questionnaires, documentation and interviews. The technique of data analysis was simple regression analysis using a frequency table. Which has processed using a Likert scale with SPSS V21 analysis. The results of this study indicate that the most influential indicator in public participation was the implementation of participation at 69.6% and the lowest result was the participation indicator in making decision at 62.8%. The most influential indicator in good governance was the rule of law at 68.8% and the lowest result was openness at 48.8%, these results are found based on processed questionnaire data and SPSS V21.*

*Keywords : Public Participation, Good governance*

## A. PENDAHULUAN

*Good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut disebut sebagai administrasi pembangunan. Pada dasarnya, penerapan tata pemerintahan yang baik merupakan pelayan publik yang lebih baik kepada masyarakat, maka dari itu *good governance* ini sangat penting di terapkan di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Manajemen pembangunan atau administrasi pembangunan menempatkan peran pemerintah sentral. Maka pemerintah menjadi (agen perubahan), dari suatu masyarakat (developing) dalam negara berkembang, khususnya pada wilayah daerah.

*Planned*, perubahan berencana, maka disebut juga *agent of development* yaitu pendorong proses pembangunan, perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program yang telah ditetapkan. Pada umumnya mengatikan *good governance* dengan pemerintahan yang bersih, atau *clean government*. Disini *governance* sangat menjadi poin penting dalam meningkatkan tata pemerintahan yang baik di suatu daerah. Disini, diajukan suatu pemikiran awal, tentang *good governance* sebagai manajemen pembangunan/paradigma baru administra. Kata kunci *governance* adalah *consensus building* dan akomodasi, kepentingan ini sebagai basis untuk membangun sinergi bekerjanya lembaga negara secara baik dan merata, juga mendorong pada penguatan lembaga-lembaga pasar dan civil society. Hubungan-hubungan kekuasaan antara negara, pasar dan masyarakat menjadi relative otonom dan horizontal. Catlaw (2007 : 90) mengkritik bahwa konsep *governance* yang bertumpu pada representasi atas tiga pilar atau yang lebih dikenal dengan state-market-civil society model. (Zainuddin, 2017). Agar system sistematik maka, secara konsisten perubahan lingkungan diperlukan persyaratan yang penting, yakni adanya effective partnership yang meliputi 3 hal, yakni: sharing power, responsibility, and achievement, yang dikemukakan oleh Farazman (2004 :81). (Zainuddin, 2017).

Konsep *good governance* ini muncul dikarenakan karena kurang efektifnya kinerja di dalam pemerintah selama ini sangat dipercaya oleh masyarakat sebagai

penyeleenggara urusan publik yang bersifat terpusat hingga pada daerah bahkan tidak berpartisipasi dan tidak menumbuhkan rasa percaya di mata masyarakat dan antipati pada rezim yang berkuasa. Hampir di setiap peristiwa sangat penting yaitu membahas masalah pemerintah, Oleh karena itu, masyarakat di desa Damai diharapkan menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, karena *Good governance* ini merupakan perwujudan rill, masyarakat seperti ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintahan. Sebaliknya, pada masyarakat yang masih belum berdaya guna dihadapan pemerintah dan masih banyak masalah sosial seperti konflik dan anarkisme kelompok, maka sangat kecil kemungkinan *Good governance* itu ditegakkan.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang dapat mendukung masyarakat untuk mulai "sadar" akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Sumardi (2010:46), mengemukakan bahwa partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kesesuaian hasil observasi dengan konsep teori *good governance* ini merupakan implementasi dari terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dan selanjutnya Conyers (1991: 154-155) mengemukakan bahwa adanya tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, bahwa partisipasi masyarakat merupakan alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat. Kedua, bahwa masyarakat akan mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa terlibat di dalam proses atau program pembangunan, kepercayaan semacam ini adalah penting apabila mempunyai tujuan agar dapat diterima oleh masyarakat setempat. Ketiga, bahwa alasan yang mendorong adanya partisipasi umum diberbagai negara karena timbul asumsi

bahwa suatu hak demokrasi bila masyarakat terlibat dalam pembangunan (Pidarta, 2009).

Secara konseptual bahwa tujuan dari kegiatan mengidentifikasi permasalahan adalah agar tertanam suatu pemahaman dan meningkatkan kesadaran dari warga masyarakat. Perwujudan *good governance* adalah kebutuhan mutlak dalam masyarakat. Hal ini dapat juga menjadi faktor terwujudnya *good governance* yang mengkhendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, perumusan arus investasi, dan komunikasi pemerintah terhadap sumber daya manusia yang ada dalam ruang lingkup pemerintahan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 7 Januari 2020 di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang peneliti menemukan masalah yang meliputi Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, contohnya dalam Musrembang, masyarakat kurang ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, Kurangnya pulatanggung jawab dan keikutsertaan masyarakat di dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, hal ini terlihat dari seringnya masyarakat datang terlambat dalam suatu kegiatan dan juga terlihat dari tingkat absensi masyarakat atau kurangnya yang ikut berpartisipasi, Kurangnya kesadaran aparat pemerintah desa dalam mencari tahu informasi yang dapat digunakan untuk menangani masalah kebutuhan, kondisi dan sikap masyarakat setempat serta kurang peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, contohnya adalah kebutuhan dalam hal lapangan pekerjaan, dan Masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memperoleh hak untuk terlibat langsung dalam menentukan program-program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik ingin mengkaji, meneliti, menganalisa dan mengetahui lebih dalam tentang "Partisipasi Masyarakat Terhadap Perwujudan *Good governance* di desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang".

## B. METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif, dengan

metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat, jelas dan objektif mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun populasi dengan jumlah keseluruhan 476 jiwa. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Rumus Slovin*. Berdasarkan hasil perhitungan, maka penulis menentukan sampel yaitu 83 orang.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwujudan *good governance* di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari penelitian tersebut diperoleh informasi yang dijadikan bahan penelitian dan kesimpulan. Data dan informasi yang diperoleh melalui hasil koesioner tersebut kemudian dianalisa sebagai berikut:

### 1. Partisipasi masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat pertama adalah Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah dimana partisipasi pemerintah desa dengan masyarakat harus selaras untuk menuju kata sepakat. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 62,8%. Indikator yang ke 2 adalah Partisipasi dalam pelaksanaan adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program desa yang dilakukan. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 69,6%. Indikator yang ke 3 adalah Partisipasi dalam pengambilan manfaat adalah setelah adanya partisipasi masyarakat maka masyarakat akan merasakan hasil dari manfaat yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 63%. Indikator yang ke 4 adalah Partisipasi dalam evaluasi adalah dalam partisipasi ini dimana masyarakat juga sangat berperan penting untuk melihat sejauh mana program yang telah terlaksana dan apa yang perlu diperbaiki agar kegiatan berikutnya bisa lebih baik lagi. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 67%

### 2. *Good governance*

Indikator *good governance* yang pertama adalah Akuntabilitas adalah ketika pemerintah desa harus memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 52,4%. Indikator yang ke 2 adalah Transparansi adalah komunikasi harus terbuka dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

desa harus diketahui oleh pihak-pihak tertentu, terutama pada masyarakat. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 66,6%. Indikator yang ke 3 adalah Keterbukaan adalah pemerintah desa memberikan informasi secara terbuka baik itu saran maupun kritikan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk membangun desa lebih baik lagi. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 48,8%. Indikator yang ke 4 adalah Supremasi hukum adalah adanya penindakan tegas dan keputusan dalam kebijakan pemerintah desa serta organisasi yang menyangkut kepentingan masyarakat dilakukan berdasarkan hukum. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 68,8%. Indikator yang ke 5 adalah Jaminan adalah dimana pemerintah desa harus berperilaku adil terhadap masyarakat. Dalam hal ini meninjau pelaksanaannya sebesar 58%.

Berdasarkan tabel coefficient hasil olah data spss, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur Partisipasi Masyarakat terhadap Perwujudan *Good governance* di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Jika nilai  $t$  hitung  $\geq t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya Signifikan
2. Jika nilai  $t$  hitung  $\leq t$  tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya tidak Signifikan

Tabel coefficients diperoleh  $t$  hitung = 41,364 prosedur mencari statistic tabel dengan kriteria :

1. Tingkat signifikan ( $\alpha = 0,05$ )
2.  $df = \text{Jumlah Responden} - 2$  atau  $83 - 2 = 81$

Sehingga  $t$  tabel = 1,663

Keputusan :

Ternyata nilai  $t$  hitung  $>$  tabel, atau  $41,364 > 1,663$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya signifikan. Jadi, Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Perwujudan *Good governance* di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator partisipasi masyarakat (X) di Desa Damai Kecamatan Watang

Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi: partisipasi dalam pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis distribusi frekuensi pada variabel X (partisipasi masyarakat) maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 66% dengan kategori baik.

2. Indikator perwujudan masyarakat (Y) di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum, jaminan. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis distribusi frekuensi pada variabel Y Perwujudan *good governance*) maka diperoleh rata-rata persentase sebesar 59% dengan kategori "kurang baik".
3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap *Good governance* di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang di buktikan dari hasil uji  $t$  dengan nilai hitung  $\geq t$  tabel atau  $41,364 > 1,663$  berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Perwujudan *Good governance* di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang serta hasil ideal kedua variabel 95%.

#### E. REFERENSI

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi*. Gava Media.
- Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini, D. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta.
- Ari Yuliantini Griadhi, N. M., & Sri Utari, D. (1970). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Kertha Patrika*, 33(1), 1–5. <https://doi.org/10.24843/kp.2008.v33.i01.p01>
- Diarsih, K., Pitoewas, B., & Nurmalisa, U. (2015). *Pengaruh Partisipasi Pada Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah Terhadap Sikap Demokrasi Siswa*.

- Dyastari, & Letizia, E. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. 6(3), 1361–1374.
- Hadi, A. P. (2015). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangun. *Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, 1987*, 1–14.
- Irwan, Latif, A., Sofyan, Mustanir, A., & Fatimah. (2019). *Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*. 5.
- Latif, A., Irwan, & Dkk. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah*, 5(1), 1–15.  
file:///C:/Users/USER/Downloads/1898-6638-1-PB.pdf
- Maryam, & Siti, N. (2016). Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Mulyadi, M. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Nadi Pustaka.
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi Pemerintahan*. Alfabeta.
- Mustanir, A., Madaling, Uceng, A., Kasau, M. N. R., Barisan, & Andriani, D. (2019). *Karakteristik Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sideren Rappang*. 2(2), 5–10.
- Pidarta, M. (2009). *Konsep Partisipasi*. 31–32. <https://doi.org/10.1245/s10434-011-1566-x>
- Razak, M.R.R.R;Harfiah, S. (Universitas M. S. R. (2018). Partisipasi Masyarakat di Daerah Pegunungan terhadap Perwujudan *Good governance*. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3), 476–486.
- Samad, Z., Mustanir, A., & Pratama, M. Y. P. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Untuk Mewujudkan Good governance Kabupaten Enrekang*. 5(November), 379–395.
- Sucahyo, I. (2017). Partisipasi Stakeholders Islam dalam Upaya Mereformasi Peraturan Daerah tentang Usaha Tempat Hiburan di Kota Probolinggo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1939>
- Sudrajat, & Tedi. (2009). Perwujudan *Good governance* Melalui Format Reformasi. *Dinamika Hukum*, 9(2), 118–125.
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18–32. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2126>
- zainuddin. (2017). *Teori-taori Mutakhir Dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. phinatama media (phinisi utama media).
- Zainuddin Samad. (2016). *Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. penerbit ombak.
- Zunita, & Ratna, P. (2010). *Jurnal sosial dan politik*. IX(116), 1–9.